



KEMENTERIAN PERTANIAN

DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 GEDUNG C 6-9 PASAR MINGGU, JAKARTA 12550

KOTAK POS 1180/JKS, JAKARTA 12011

Telp. (021) 7815580 - 83, 78847319, Faksimile (021) 7815581 - 83, 78847319 E-mail : ditjennak@pertanian.go.id

Website : <http://ditjenpkh.pertanian.go.id>

Nomor : 08013/Kp.240/F1/10/2018
Lampiran : satu eksemplar
Hal : Nama Pejabat Fungsional RIHP
bidang PKH melalui Penyesuaian/Inpassing

8 Oktober 2018

Yth.

(terlampir)

di Tempat

Dengan telah selesainya pelaksanaan Uji Kompetensi Pejabat Fungsional RIHP bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan melalui Penyesuaian/Inpassing berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB No. 26 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata cara Penyesuaian/Inpassing PNS dalam jabatan fungsional bidang pertanian.

Bersama ini agar Saudara menyampaikan daftar para calon pejabat fungsional RIHP yang telah diangkat dalam jabatan fungsional melalui Penyesuaian/Inpassing tahun 2017 dan 2018 di unit kerja Saudara (form terlampir).

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal,



Nasrullah
Dr. Ir. Nasrullah, M.Sc
NIP. 196602231993031001

Tembusan :
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Lampiran Surat Nomor : 08013/Kp.240/F1/10/2018
Tanggal Surat : 8 Oktober 2018

Undangan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi;
2. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung;
3. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat;
4. Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kep. Bangka Belitung;
5. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo;
6. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau;
7. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta;
8. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat;
9. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten;
10. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Dinas Pertanian Provinsi D.I. Yogyakarta;
12. Kepala Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat;
13. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah;
14. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan;
15. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah;
16. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan;
17. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Agam;
18. Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin;
19. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota;
20. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Solok Selatan;
21. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Puhuwato;
22. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu;
23. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bangka Barat;
24. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bangka Selatan;
25. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesawaran;
26. Kepala Dinas Peternakan, Perkebunan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kampar;
27. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko;
28. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sarolangun;
29. Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Lebong;
30. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang;
31. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor;
32. Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kuningan;
33. Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo;
34. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut;
35. Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batang;

36. Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo;
37. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga;
38. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Karanganyar;
39. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Klaten;
40. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pati;
41. Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purworejo;
42. Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pemalang;
43. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Jombang;
44. Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman;
45. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul;
46. Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Wonogiri;
47. Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo;
48. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tuban;
49. Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun;
50. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar;
51. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember;
52. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sekadau;
53. Kepala Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sambas;
54. Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sumbawa Barat;
55. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas;
56. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Banjar;
57. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pulau Pisau;
58. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut;
59. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah;
60. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Barat;
61. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Muaro Jambi;
62. Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu;
63. Kepala UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih/Bibit Pertanian dan Peternakan Provinsi Maluku;
64. Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian Kota Lhokseumawe;
65. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro;
66. Kepala Dinas Pertanian Kota Pagaram;
67. Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang;
68. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Sukabumi;
69. Kepala Dinas Pertanian Kota Bogor;
70. Kepala Dinas Pertanian Kota Salatiga;
71. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Tegal;
72. Kepala Dinas Pertanian Kota Samarinda;
73. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru;

Lampiran

No Surat : 00013/Kp.240/F1/10/2018
Tanggal Surat : 8 Oktober 2018
Perihal : Nama Pejabat Fungsional RIHP bidang PKH
melalui Penyesuaian/Impassing

No	Nama/NIP	Pangkat/Gol TMT	Jabatan Fungsional RIHP	No. Tgl SK Pengangkatan Jab. Fungsional RIHP	Ditugaskan di unit kerja
1					
2					
dst...					

